



BUPATI MALUKU TENGAH  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH MALUKU TENGAH

NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TYPE D

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 110 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Type D tidak sesuai sehingga perlu diganti;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Type D;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3951);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Dokter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2016 Nomor 183);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

dan

BUPATI MALUKU TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TYPE D.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
8. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer dan perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

11. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
12. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diaognosis, pengobatan rehabilitasi medik atau pelayanan kesehatan lainnya.
13. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik atau pelayanan lainnya tanpa tinggal dirawat inap.
14. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
15. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
16. Tindakan medik dan terapi adalah tindakan dengan atau tanpa pembedahan dengan menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
17. Pelayanan bedah sehari atau One Day Surgery (ODS) adalah pelayanan tindakan medis operatif yang dilakukan di ruangan/kamar operasi tanpa dilakukan rawat inap.
18. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kesehatan untuk menunjang diagnosis dan terapi.
19. Pelayanan Rehabilitas Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh instansi rehabilitasi medik dalam pelayanan pemeriksaan dokter rehabilitasi medik, fesioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prosetik, jasa psikologi, pekerja sosial medik serta rehabilitasi lainnya.
20. Pelayanan Formasi adalah pelayanan yang meliputi kegiatan penyediaan penyimpanan, distribusi pelayanan dan pengkajian resep, penyiapan formulasi, evaluasi, penyebaran informasi serta pengawasan kualitas sediaan obat dan alat kesehatan pakai habis.
21. Pelayanan Gizi adalah pelayanan yang meliputi kegiatan pengadaan makan untuk pasien dan petugas, pelayanan gizi di ruang rawat inap, penyuluhan dan konsultasi, serta penelitian dan pengembangan gizi terapan.
22. Direktur adalah direktur Rumah Sakit Umum Daerah Masohi.
23. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima RSUD Masohi atas pemakaian sarana termaksud bahan kimia, bahan radiologi, alat dan fasilitas yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitas serta pelayanan lainnya.

24. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang di terima oleh pelaksana yang secara langsung maupun tidak langsung melakukan pelayanan kepada pasien dalam rangka observasi, asuhan keperawatan, diagnosis, pengobatan konsultasi, visite, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan lainnya.
25. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
26. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan kebersihan/persampahan dari pemerintah Kabupaten.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya SKRD, adalah surat yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
28. Surat Setoran Restribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditentukan oleh Bupati.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari mengumpulkan dan mengelolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
30. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang mengatur undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
31. Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
32. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya

## BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Type D, dipungut Retribusi atas setiap pemberian Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Type D.

### Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Type D dikecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

### Pasal 4

Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada RSUD Type D.

## BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Type D digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

## BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan dan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.

### Pasal 7

Jenis Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang dikenakan retribusi adalah :

- a. pelayanan instalasi rawat jalan;
- b. pelayanan instalasi rawat darurat;
- c. pelayanan instalasi rawat inap;
- d. pelayanan tindakan medik dan terapi;
- e. pelayanan bedah sehari atau One Day Surgery (ODS);
- f. pelayanan penunjang medik;

- g. pelayanan rehabilitasi medik;
- h. pelayanan Penunjang Non Medik :
  - pelayanan instalasi farmasi;
  - pelayanan unit transfusi darah;
  - pelayanan pemulasaran jenazah;
  - pelayanan mobil ambulance / mobil jenazah;
  - pelayanan recovery room;
  - pelayanan forensik-medikolegal dan pemulasaran jenazah.
- i. pelayanan kesehatan lainnya;
- j. pelayanan Pendidikan.

## BAB V

### PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif pelayanan kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyelenggaraan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan pelayanan publik.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk jasa pelayanan kesehatan, biaya sarana prasarana dan transportasi.

## BAB V

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 9

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan kepada pasien.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

#### Pasal 10

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Peninjauan dan penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.



## BAB VI

## WILAYAH PUNGUTAN

## Pasal 11

Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Type D dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

## BAB VII

## TATA CARA PUNGUTAN

## Pasal 12

- (1) Pungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII

## TATA CARA PENAGIHAN

## Pasal 13

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang membayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran yang terutang/surat peringatan/surat izin lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat lain yang sejenis, wajib retribusi segera melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran/surat peringatan/surat izin lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX

### TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya sejak diterbitkannya SKDR atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran retribusi dan dicatat dalam buku penerimaan retribusi daerah.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 15

- (1) Retribusi yang terutang, disetorkan ke kas daerah atau melalui petugas yang ditunjuk
- (2) Bupati dapat memberikan keputusan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau melakukan penundaan pembayaran retribusi.
- (3) Keputusan mengangsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

## BAB X

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 16

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB XI

### PENGURANGAN, KERINGANAN DAN

### PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 17

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;

- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## BAB XII

### KEDALUWARSA PENAGIHAN

#### Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dan Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

#### Pasal 19

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XIII

### PENYIDIKAN

#### Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan atau bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindak lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau Pidana Denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi  
pada tanggal 22 Maret 2022  
BUPATI MALUKU TENGAH,

ttd

TUASIKAL ABUA

Diundangkan di Masohi  
pada tanggal 22 Maret 2022  
SEKRETARIS DAERAH MALUKU TENGAH,

ttd

RAKIB SAHUBAWA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2022  
NOMOR 228.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH PROVINSI  
MALUKU 14/21/2022.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH MALUKU TENGAH  
NOMOR 14 TAHUN 2022  
TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TYPE D

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang dapat mempertinggi derajat kesehatan manusia sebagai modal dalam pelaksanaan pembangunan, oleh karena itu pembangunan kesehatan yang merupakan upaya peningkatan kesehatan, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan harus dilaksanakan secara menyeluruh terpadu dan berkesinambungan serta dilaksanakan secara bersama-sama antara pemerintah daerah dan masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan efisien dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat terutama pelayanan kesehatan, Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengenakan pungutan kepada masyarakat salah satunya berupa retribusi pelayanan kesehatan. Untuk itu dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan akan memberikan penguatan bagi daerah untuk melakukan pembebanan retribusi, sehingga retribusi akan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesehatan rakyat.

Bahwa dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah dalam melaksanakan pungutan retribusi atas pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Type D, diharapkan akan terselenggara dengan baik dan memberikan dampak yang positif tidak hanya bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah akan tetapi dapat juga memberikan kepastian hukum dalam melakukan pemungutan retribusi di Rumah Sakit dimaksud.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Penyidik dibidang retribusi daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh Menteri Kehakiman dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyidik tindak pidana dibidang retribusi daerah dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas





LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

NOMOR : 14 TAHUN 2022

TANGGAL : 22 MARET 2022

TENTANG : RETRIBUSI PELAYANAN RSUD TYPE D

PELAYANAN UNIT GAWAT DARURAT					
NO	JENIS TINDAKAN DAN TERAPI	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		JUMLAH (Rp.)
			TIND. MEDIK (Rp.)	TIND. ANESTESI (Rp.)	
1	VENA SECTIO	63,000	105,000	53,000	221,000
2	EKSTRASI BENDA ASING PADA HIDUNG/TEL	8,500	21,000		29,500
3	PENCUCIAN LAMBUNG PADA KERACUNAN	33,000	55,000		88,000
4	RESUSITASI KARDIOPULMONER	32,000	13,000		45,000
5	KATETERISASI URETHRA	13,000	33,000		46,000
6	PEMASANGAN SONDE PERTAMA	18,000	31,000		49,000
7	PEMASANGAN SONDE ULANGAN	9,000	15,500		24,500
8	PEMASANGAN INFUS PERTAMA	6,000	15,000		21,000
9	PEMASANGAN INFUS ULANGAN	3,000	7,500		10,500
10	PEMASANGAN INFUS ANAK	10,000	26,000		36,000
11	PUNKSI BLASS	20,000	35,000		55,000
12	JAHIT LUKA DENGAN LUKA 1 SD 5 JAHITAN	14,000	36,000	11,000	61,000
13	LUKA DIATAS 5 JAHITAN DITAMBAHKAN Rp. 7.000,- PERJAHITAN	20,000	49,000	9,800	78,800
14	SIRKUMSISI	15,000	40,000		55,000
15	EKSTRAKSI SERUMEN	10,000	24,000		34,000
16	REPOSISI TULANG SENDI/TMJ (TEMPORO MANDIBULAR JOINT)	25,000	15,000		40,000
17	AFF SONDE/KATETER	15,000	6,000		21,000
18	PEMBERIAN OBAT SUPOSITORIA	18,000	8,000		26,000
19	PEMULASARAN JENAZAH NON INFEKSIUS	20,000	51,000		71,000
20	PEMULASARAN JENAZAH INFEKSIUS	45,000	113,000		158,000
21	PEMBERIAN OBAT ORAL	1,500	3,500		5,000
22	VISUM ET REPERTUM	35,000	90,000		125,000
23	VISUM ET REPERTUM LUAR KORBAN MENII	54,000	89,000		143,000
24	PEMASANGAN EKG	30,000	18,000		48,000
25	PEMAKAIAN ALAT PENGISAP	31,500	31,500		63,000
26	PEMASANGAN NEBULYZER	6,000	15,000		21,000
27	PEMASANGAN MONITOR	10,000	10,000		20,000
28	KLISMA/HUKNAH	13,000	31,000		44,000
29	TINDAKAN MENYUNTIK	2,000	6,000		8,000
30	GANTI VERBAN				
	- LUKA KECIL	20,000	8,000		28,000
	- LUKA BESAR	40,000	16,000		56,000
31	LUKA BAKAR s/d 30%	18,000	18,000		36,000
32	LUKA BAKAR LEBIH 30%	23,000	40,000		63,000
33	INSISI ABSES KECIL (1-5cm)	22,000	9,000	2,700	33,700
34	INSISI ABSES BESAR (>5cm)	20,000	33,000	10,000	63,000
35	EKSTRASI KUKU	15,000	36,000		51,000
36	SPOOLING TELINGA	12,500	12,500		25,000
37	PEMASANGAN OKSIGEN LITER/JAM	27,000	18,000		45,000
38	IRIGASI MATA	29,000	11,000		40,000

Catatan :

- Jasa Medical Record @Rp. 5.000,-

- Record @ Rp. 5000,-

**TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK**

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		JUMLAH (Rp.)
			(Rp.)	(Rp.)	
A	<b>HEMATOLOGI</b>				
1	Darah Lengkap	28,000	28,000		56,000
2	Kolesterol Total	31,000	19,000		50,000
3	Asam Urat	18,000	11,000		29,000
4	Hemoglobin	4,500	4,500		9,000
5	DDR	10,000	10,000		20,000
B	<b>KIMIA KLINIK</b>				
1	CT/BT	7,000	6,000		13,000
2	SGOT	22,000	13,000		35,000
3	Gula Darah Sewaktu	14,500	14,500		29,000
4	KREATININ	20,000	13,000		33,000
5	UREUM	21,000	12,000		33,000
6	TRIGLISERIDA	24,000	14,000		38,000
C	<b>IMUNOLOGI/INFEKSI</b>				
1	HIV	65,000	39,000		104,000
2	Golongan Darah	11,000	4,000		15,000
3	HBS Ag	18,000	8,000		26,000
4	HCG	8,500	8,500		17,000
D	<b>URINALISIS</b>				
1	Urin Lengkap	11,000	5,000		16,000
2	Protein Urin	6,000	6,000		12,000
E	<b>LAIN-LAIN</b>				
1	Sputum BTA	12,000	12,000		24,000
2	BTA M HARSEN	12,000	12,000		24,000

**PELAYANAN TINDAKAN PERAWATAN**

NO	JENIS TINDAKAN DAN TERAPI	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		JUMLAH (Rp.)
			TIND. MEDIK (Rp.)	TIND. ANESTESI (Rp.)	
1	CUCI LUKA	27,000	11,000		38,000
2	PENYULUHAN KESEHATAN	2,000	3,000		5,000
3	AMBULASI	2,000	6,000		8,000
4	PASANG KATETER TETAP	6,000	17,000		23,000
5	PUNKSI BLASS	10,000	25,000		35,000
6	VENA SECTIO	63,000	105,000	53,000	221,000
7	PEMASANGAN SONDE PERTAMA	12,000	21,000		33,000
8	PEMASANGAN SONDE ULANGAN	7,000	13,000		20,000
9	RESUSITASI KARDIOPULMONER	30,000	77,000		107,000
10	PEMASANGAN INFUS ULANGAN	5,000	11,000		16,000
11	RECTAL TOUCHER PER PASIEN	6,000	15,000		21,000
12	MEMANDIKAN PASIEN	3,000	10,000		13,000
13	PERAWATAN MULUT	4,000	9,000		13,000
14	KLISMA/HUKNAH	13,000	31,000		44,000
15	PERAWATAN INFUS	2,000	6,000		8,000
16	PERAWATAN KATETER	2,000	6,000		8,000
17	PERAWATAN OKSIGEN	1,000	2,000		3,000
18	PEMASANGAN INFUS PUMP	14,000	14,000		28,000
19	SYRINGE PUMP	14,500	14,500		29,000
20	NEBULIZER	16,500	16,500		33,000
21	PELAYANAN TINDAKAN FARMASI				
	- PENCAMPURAN OBAT SUNTIK	2,000	3,000		5,000
	- PENYIAPAN NUTRISI PARENTRAL	5,000	12,000		17,000
	- TINDAKAN MENYUNTIK PER HARI	2,000	6,000		8,000
	- PELAYANAN RESEP NON RACIKAN+KIE	2,000	4,000		6,000

	- PELAYANAN RESEP RACIKAN + KIE	3,000	7,000		10,000
	- VISITE APOTEKER	2,000	2,000		4,000
	- DISPENSING OBAT SUNTIK	2,000	3,000		5,000
	- DISPENSING PARENTERAL NUTRISI	5,000	12,000		17,000
22	DRAINASE ABSES	34,000	83,000		117,000
23	PEMASANGAN EKG	30,000	18,000		48,000
24	PEMBERIAN OBAT ORAL	1,500	3,500		5,000
25	PEMASANGAN OKSIGEN LITER/JAM	27,000	18,000		45,000
26	PEMBERIAN OBAT SUPOSITORIA	18,000	8,000		26,000
27	PEMAKAIAN ALAT PENGISAP	31,500	31,500		63,000
28	PEMBERIAN NUTRISI PARENTERAL	12,000	5000		17,000

*Catatan*

- Setiap hari perawatan ditambah visite apoteker dan visite gizi @Rp. 4.000,-
- Jasa Medical Record @Rp. 6.500,-
- Record @Rp. 6.500,-
- Total : @Rp. 13.000,-

**POLI KLINIK GIGI DAN MULUT**

NO	JENIS TINDAKAN DAN TERAPI	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		JUMLAH (Rp.)
			TIND. MEDIK(Rp)	TIND. ANASTESI (Rp)	
1	PENCABUTAN GIGI PERMANEN TIAP ELEMEN	12,000	20,000	9,000	41,000
2	PENCABUTAN GIGI DENGAN KOMPLIKASI T	14,000	24,000	16,000	54,000
3	TUMPATAN PERMANEN TIAP ELEMEN GIGI DENGAN BAHAN AMALGAM/SILICAT				
	- KELAS I - II	13,000	33,000		46,000
	- KELAS III - IV	15,000	38,000		53,000
4	TUMPATAN SEMENTARA PER ELEMEN	7,000	16,000		23,000
5	PULP CACING	19,000	48,000		67,000
6	GINGIVECTOMY TIAP KUADRAN	31,000	12,000	4,000	47,000
7	ALVEOLEKTOMI TIAP DAERAH	20,000	8,000	2,000	30,000
8	PENCABUTAN GIGI TERBENAM	35,000	58,000		93,000
9	PENCABUTAN GIGI SUSU	20,000	9,000	4,000	33,000
10	SCALLING TIAP KUADRAN	12,000	20,000		32,000
11	TREPANASI	15,000	6,000	2,000	23,000
12	TUMPATAN KOMPOSIT ANTERIOR	29,000	11,000		40,000
13	TUMPATAN KOMPOSIT POSTERIOR	49,000	20,000		69,000
14	BUKA SALURAN AKAR	14,000	23,000		37,000
15	PERAWATAN SALURAN AKAR	30,000	17,000		47,000
16	PENGISIAN SALURAN AKAR	8,000	21,000		29,000

**PELAYANAN TINDAKAN MEDIK DAN PERSALINAN**

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	PERSALINAN FISIOLOGIS			
	- Ditolong Bidan	172,000	288,000	460,000
	- Ditolong Dokter Umum	223,000	377,000	600,000
	- Ditolong Dokter Ahli	254,000	426,000	680,000
2	PERSALINAN PATOLOGIS DENGAN/ TANPA BANTUAN ALAT			
	- Ditolong Bidan	222,000	378,000	600,000
	- Ditolong Dokter Umum	270,000	455,000	725,000
	- Ditolong Dokter Ahli	359,000	601,000	960,000

3	CURETASE			
	- Ditolong Bidan	222,000	378,000	600,000
	- Ditolong Dokter Umum	270,000	455,000	725,000
	- Ditolong Dokter Ahli	350,000	600,000	950,000
4	VULVA HIGIENY	12,000	20,000	32,000
5	VAGINA TOUCHER	12,000	22,000	34,000
6	PASANG TAMPOL SEDERHANA	16,000	42,000	58,000
7	AFF TAMPOL SEDERHANA	8,000	21,000	29,000
8	EXPLORASI	23,000	40,000	63,000
9	PERAWATAN PERINIUM	10,000	23,000	33,000
10	IRIGASI VAGINA	17,000	28,000	45,000
11	DOPLER	4,000	9,000	13,000
12	BREADSCARE	13,000	22,000	35,000
13	INSPECULO	17,000	28,000	45,000
14	PEMERIKSAAN IVA	22,000	37,000	59,000
15	MEMANDIKAN PASIEN DEWASA	7,000	17,000	24,000
16	KIE ( KONSELING )	9,000	14,000	23000
17	PERAWATAN NIFAS	8,000	20,000	28,000
18	PERAWATAN BAYI DENGAN INCUBATOR			
	- Fisiologi	20,000	30,000	50,000
	- Patologis	40,000	68,000	108,000
19	PERAWATAN BAYI DENGAN NON INCUBATOR			
	- Fisiologi	13,000	21,000	34,000
	- Patologis	31,000	53,000	84,000
20	MEMANDIKAN BAYI	6,000	4,000	10,000
21	MERAWAT TALI PUSAR DENGAN ATAU TANPA KOMPLIKASI	7,000	18,000	25,000
22	INJEKSI BAYI	3,000	9,000	12,000
23	IMUNISASI	5,000	8,000	13,000
24	PERAWATAN PHOTO THERAPY	33,000	20,000	53,000
25	SUCTION	33,000	20,000	53,000
26	RESUSITASI BBL	61,000	36,000	97,000
27	TINDIK BAYI	18,000	46,000	64,000
28	LATIH KANDUNG KEMIH	8,000	20,000	28,000
29	DIGITAL/MANUAL PLASENTA	74,000	124,000	198,000
30	JAHIT PERINEUM GRADE I-II	20,000	34,000	54,000
31	JAHIT PERINEUM GRADE III-IV	67,000	111,000	178,000
32	KOMPRESI BIMANUAL	29,000	48,000	77,000
33	INDUKSI/ AKSELERASI PERSALINAN	113,000	189,000	302,000
34	PEMASANGAN OKSIGEN LITER/JAM	27,000	18,000	45,000

#### PELAYANAN MOBIL AMBULANCE / MOBIL JENAZAH

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	PELAYANAN MOBIL AMBULANCE			
	a. Dalam kota	56,000	23,000	79,000
	b. Luar kota s/d jarak 5 km	66,000	44,000	110,000
	c. Selebihnya ditambah per km	25,000	25,000	50,000
2	PELAYANAN MOBIL JENAZAH			
	a. Dalam kota	62,000	25,000	87,000
	b. Luar kota s/d jarak 5 km	69,000	46,000	115,000
	c. Selebihnya ditambah per km	25,000	25,000	50,000
3	PELAYANAN AMBULANCE LAUT			
	a. Per/mil laut dalam satu Kabupaten	8,932,200	5,954,800	14,887,000
	b. Per/mil laut diluar Kabupaten	27,462,000	18,308,000	45,770,000

**POLIKLINIK KEBIDANAN DAN KANDUNGAN**

NO	JENIS TINDAKAN DAN TERAPI	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		JUMLAH (Rp.)
			TIND. MEDIK (Rp.)	TIND. ANASTESI (Rp.)	
1	PERAWATAN LUKA POST OPERASI	9,000	22,000		31,000
2	SUNTIK KB	10,000	15,000		25,000
3	PASANG/LEPAS PESARIUM	9,000	22,000		31,000
4	PEMASANGAN IUD	39,000	61,000		100,000
5	PENCABUTAN IUD	22,000	36,000		58,000
6	PEMASANGAN INPLANT	37,000	66,000	27,000	130,000
7	PENCABUTAN INPLANT	30,000	50,000		80,000
8	DOPLER	10,000	10,000		20,000
9	USG	40,000	35,000		75,000
10	IMUNISASI IBU HAMIL	10,000	15,000		25,000
11	IMUNISASI BAYI	10,000	15,000		25,000

**PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA**

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA	JASA	JUMLAH (Rp)
		SARANA	PELAYANAN (Rp)	
1	Keterangan Sakit/Lahir/Kematian	2,500	7,500	10,000
2	Keterangan Sehat/Catin	4,200	10,800	15,000
3	Keterangan Bebas Napza	6,000	15,000	21,000
4	Keterangan Tidak Terganggu Jiwa	10,000	20,000	30,000
5	Ver Korban Hidup	7,250	22,750	30,000
6	Ver Korban Mati	15,000	26,250	41,250

**PELAYANAN PEMERIKSAAN RADIODIAGNOSYIT**

**KATEGORI TINDAKAN MEDIS PEMERIKSAAN RADIOLOGI**

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	MANUS AP	93,000	38,000	131,000
2	MANUS AP & LATERAL (2)	95,000	39,000	134,000
3	WRIST JOINT AP	93,000	38,000	131,000
4	WRIST JOINT AP & LAT (2)	95,000	39,000	134,000
5	ANTEBRACHI AP	94,000	56,000	150,000
6	ANTEBRACHI AP & LAT (2)	95,000	58,000	153,000
7	ELBOW JOINT AP	93,000	38,000	131,000
8	ELBOW JOINT AP & LAT (2)	95,000	39,000	134,000
9	HUMERUS AP	93,000	38,000	131,000
10	HUMERUS AP & LAT (2)	95,000	39,000	134,000
11	SHOULDER JOINT AP	93,000	38,000	131,000
12	SHOULDER JOINT AP & LAT (2)	95,000	39,000	134,000
13	PEDIS AP	93,000	38,000	131,000
14	PEDIS AP & LATERAL (2)	95,000	39,000	134,000
15	ANKLE JOINT AP	93,000	38,000	131,000
16	ANKLE JOINT AP & LAT (2)	95,000	39,000	134,000

17	CRURIS AP	93,000	38,000	131,000
18	CRURIS AP & LATERAL (2)	95,000	39,000	134,000
19	KNEE JOINT AP	93,000	38,000	131,000
20	KNEE JOINT AP & LAT (2)	95,000	39,000	134,000
21	FEMUR AP	94,000	56,000	150,000
22	FEMUR AP & LATERAL (2)	95,000	58,000	153,000
23	HIP JOINT AP	93,000	38,000	131,000
24	HIP JOINT AP & LAT (2)	95,000	39,000	134,000
25	THORAX AP	94,000	56,000	150,000
26	THORAX AP & LATERAL (2)	95,000	58,000	153,000
27	CLAVICULA AP	94,000	56,000	150,000
28	CLAVICULA AP & AXIAL (2)	95,000	58,000	153,000
29	SCAPULA AP	94,000	56,000	150,000
30	SCAPULA AP LATERAL (2)	95,000	58,000	153,000
31	CRANIUM AP	94,000	56,000	150,000
32	CRANIUM AP & LATERAL (2)	95,000	58,000	153,000
33	V. CERVICAL AP	94,000	56,000	150,000
34	V. CERVICAL AP & LAT (2)	95,000	58,000	153,000
35	V. THORACAL AP	94,000	56,000	150,000
36	V. THORACAL AP & LAT (2)	95,000	58,000	153,000
37	V. THORACOLUMBAL AP	94,000	56,000	150,000
38	V. THORACOLUMBAL AP & L (2)	95,000	58,000	153,000
39	V. LUMBOSACRAL AP	94,000	56,000	150,000
40	V. LUMBOSACRAL AP & L (2)	95,000	58,000	153,000
41	PELVIS AP	94,000	56,000	150,000
42	BNO POLOS AP	94,000	56,000	150,000
43	BNO POLOS AP POSISI (2)	95,000	58,000	153,000

#### PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
			(Rp.)	(Rp.)
1	MANUAL EXCERCISE	8,000	12,000	20,000
2	TRAKSI MANUAL	8,000	22,000	30,000
3	TEST FISIOTHERAPY	8,000	17,000	25,000
4	FISIOTERAPI LATIHAN FISIK RINGAN (EXCERCISE)	7,000	8,000	15,000
5	MASSAGE BAYI	15,000	15,000	30,000
6	SENAM HAMIL	15,000	15,000	30,000
7	SENAM NIFAS	15,000	15,000	30,000

#### TARIF INSTALASI RAWAT JALAN

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA		JASA KONSULTASI MEDIK SEKALI KONSUL	TOTAL
		KUNJ. BARU	KUNJ. LAMA		KUNJ. BARU
1	POLIKLINIK UMUM	7,000	6,000	27,000	34,000
2	POLIKLINIK SPESIALIS	7,000	6,000	54,000	61,000
3	UNIT GAWAT DARURAT	7,000	6,000	27,000	34,000
4	POJOK GIZI/KONSULTASI GIZI	7,000	6,000	9,000	16,000

**TARIF KELAS PERAWATAN**

NO	KELAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	KELAS I	123,000	50,000	173,000
2	KELAS II	87,000	35,000	122,000
3	KELAS III	59,000	23,000	82,000

Catatan :

1. Jasa sarana terdiri dari : akomodasi / konsumsi dan operasional rumah sakit
2. jasa pelayanan terdiri dari : visite dokter, jasa perawat, laundry, dll
3. setiap hari perawatan di tambah visite apoteker dan visite gizi @Rp. 4000
4. konsul dokter spesialis @Rp. 40.000

**INSTALASI FARMASI**

NO	JENIS PELAYANAN	HARGA PEMBELIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	HARGA JUAL DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI ADALAH HARGA PEMBELIAN (HNA + PPN) DITAMBAHKAN 25%	HNA + PPN	20% DARI HARGA JUAL	5% DARI HARGA JUAL	25% DARI HARGA JUAL

**IV HIGH CARE UNIT**

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	AKOMODASI / HARI	155,000	155,000	310,000
2	FULL CARE / HARI	30,000	120,000	150,000
3	PEMASANGAN CVP	126,000	47,000	173,000
4	PEMASANGAN MONITOR	25,000	25,000	50,000
5	RAWAT LUKA	40,000	16,000	56,000
6	PERAWATAN LUKA BAKAR	23,000	40,000	63,000
7	PENGGUNAAN VENTILATOR / HARI	45,000	45,000	90,000
8	PERAWATAN LUKA GANGGREN	17,000	43,000	60,000
9	PEMASANGAN INTUBASI	42,000	71,000	113,000
10	TINDAKAN DC SHOCK	23,000	51,000	74,000
11	PERAWATAN CVP	13,000	33,000	46,000
12	TINDAKAN BAGING	40,000	60,000	100,000
13	TINDAKAN RESUSITASI JANTUNG PARU	44,000	24,000	68,000
14	EKG	19,000	19,000	38,000
15	PEMASANGAN ETT	50,000	150,000	200,000
16	PEMASANGAN Syringe Pump	28,500	28,500	57,000
17	PEMASANGAN INFUS Pump	12,000	12,000	24,000
18	TINDAKAN SUCTION	42,500	42,500	85,000
19	ECHOCARDIOGRAPHY	200,000	100,000	300,000
20	PEMASANGAN OKSIGEN LITER/JAM	27,000	18,000	45,000

**CATATAN :**

1. *Komponen dan besaran tarif akomodasi adalah :*
  - a. Tarif kamar yang terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan
  - b. Visite dokter umum dan dokter spesialis
  - c. Administrasi
2. *Komponen yang termasuk dalam perawatan Full Care adalah :*
  - a. Personal Hygine + Oral Hygine
  - b. Eliminasi BAB dan BAK
  - c. Tindakan Suction
  - d. ROM ( Mobilisasi )



**PELAYANAN INSTALASI KAMAR OPERASI**

NO	JENIS OPERASI	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		JUMLAH (Rp)
			Tind. Medik (Rp)	Tind. Anastesi (Rp)	
1	KECIL	500,000	600,000	300,000	1,400,000
	SEDANG	1,000,000	1,500,000	500,000	3,000,000
	BESAR	1,300,000	1,750,000	800,000	3,850,000
	KHUSUS	1,700,000	2,000,000	1,000,000	4,700,000
2	TINDAKAN RESUSITASI BAYI PADA Tind. SC	100,000	200,000		300,000

**KETERANGAN :**

Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana fasilitas rumah sakit termasuk pemakaian

1. obat, bahan habis pakai  
fasilitas Rumah Sakit termasuk pemakaian obat, bahan habis pakai
2. jasa pelayanan terdiri :
 

I. Jasa Tindakan	II. Jasa Anastesi
1. Jasa dokter spesialis	1. Jasa dokter anastesi
2. Jasa asisten dokter spesialis	2. Jasa penata anastesi
3. Jasa penata Instrumen	

didalamnya ada :

  1. jasa pelaksana administrasi
  2. jasa cleaning service
  3. jasa laundry
3. Untuk tindakan Medik dan Terapi yang tidak terencana (Cyto) dikenakan tarif tindakan terencana ditambah 30% untuk jasa pelayanan

**PELAYANAN RECOVERY ROOM (RR)**

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	RECOVERY ROOM (RR)	60,000	30,000	90,000

**PEMERIKSAAN MEDICAL CHECK UP RUMAH SAKIT**

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	MEDICAL CHECK UP	280,000	120,000	400,000

**PELAYANAN UNIT BANK DARAH**

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
2	1 BUAH KANTONG DARAH			75,000
	TOTAL BIAYA			325,000

**PELAYANAN POLI KLINIK**

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	GANTI PERBAN			
	LUKA KECIL	10,000	5,000	15,000
	LUKA SEDANG	12,000	7,000	19,000
	LUKA BESAR	15,000	10,000	25,000
2	AFF HEACTING	5,000	10,000	15,000
3	EKG	19,000	19,000	38,000

**PELAYANAN JENAZAH**

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	PEMULASARAN JENAZAH NON INFEKSIUS	20,000	51,000	71,000
2	PEMULASARAN JENAZAH INFEKSIUS	45,000	113,000	158,000
3	BEDA MAYAT ( OTOPSI )	100,000	300,000	400,000
4	KONSERVASI ( PENGAWETAN )	839,100	559,400	1,398,500
5	PEMAKAMAN	50,000	50,000	100,000

**KETERANGAN :**

Pada Konservasi (Pengawetan ) Bila formalin yang dibuthkan lebih dari 2,5 liter setiap liter ditambahkan 495.000 rb

BUPATI MALUKU TENGAH,

ttd

TUASIKAL ABUA













<b>KUNJ. LAMA</b>
33,000
60,000
33,000
15,000